

## Fokus

ada surplus sekitar Rp 18 triliun tapi di saat yang sama sebetulnya dari sisi laporan net asset kita masih defisit sekitar Rp 7 triliun. Oleh karena itu akan kita tingkatkan pengelolaan yang lebih," ujarnya.

Jajaran direksi lama telah berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap BPJS Kesehatan, terlihat dari tingkat utilisasi yang naik cukup signifikan. Namun, sejumlah pekerjaan rumah tetap menanti jajaran direksi

## Dari

Sementara cuti bersama yang tetap yakni pada 12 Mei dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan 24 Desember dalam rangka Raya Natal 2021. Pertimbangan mengapa masih diberikan satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan satu hari menjelang Natal, agar memudahkan Polri dalam mengelola pergerakan masyarakat.

"Jangan sampai terjadi penumpukan pada satu hari dan justru akan berbahaya," imbuuh Muhadzir.

## DIY

pembatasan dikhawatirkan akan memperparah kondisi penularan. Kita (zona) hijau kalau lingkungannya merah ya bisa-bisa ikut merah," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (22/2).

Ditanya perbedaan atau modifikasi aturan dalam perpanjangan PPKM Mikro ini, Sultan masih menunggu arahan lanjutan dari Pemerintah Pusat. "Saya belum tahu persis. Kita tunggu keputusan Pemerintah Pusat. Nanti bicaranya se Jawa-Bali diperpanjang. Ada persyaratan tambahan atau enggak saya belum tahu," terangnya.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DIY

## Banjir

membutuhkan bantuan maka sesuai arahan gubernur, Plh Walikota Pekalongan bisa menerbitkan surat perpanjangan status tanggap darurat 14 hari ke depan.

"Status tanggap darurat dan penanganan banjir ini akan terus dievaluasi dan disesuaikan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Ke depan tinggal melihat situasi dan kondisi, semoga tidak sampai 14 hari banjir sudah surut," katanya.

Sementara itu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus mengerahkan delapan mesin pompa menyedot air ke sejumlah lokasi untuk menyedot air banjir yang menggenangi areal persawahan di dua desa. Lokasi pertama

## Memroses

kepada khususnya Kapolri dan jajaran untuk lebih berhati-hati dalam memproses setiap pengaduan adanya tindak pidana yang menggunakan dasar UU-ITE. Dengan kata lain, jangan mudah menerjemahkan pasal-pasal yang multitafsir dalam UU ITE.

Dalam catatan penulis ada beberapa pasal dalam UU-ITE yang memiliki kecenderungan berpotensi menimbulkan masalah. Ada pasal 26 ayat (3) tentang sensor informasi, pasal 27 ayat (1) tentang penggunaan/pemanfaatan pasal untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online, dan ayat (2) nya tentang merepresi warga yang mengkritik polisi atau pemerintah. Kemudian pasal 28 ayat (2) untuk merepresi warga sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (2) diatas, pasal 29 tentang akan dipidanakan orang yang mau melapor ke polisi (ancaman), apalagi pasal 36 yang sering digunakan untuk memperberat hukuman pidana penghinaan. Pasal 40 ayat (2) a dan b yakni kejahatan yang menggunakan sarana media

baru dan harus segera diselesaikan. Menurutnya, fokus utama jajaran direksi di bawah nakhodanya adalah peningkatan kualitas layanan JKN dengan inovasi teknologi dan sistem informasi.

Salah satu permasalahan krusial adalah antrean peserta JKN yang lama, sehingga mengganggu pelayanan kesehatan.

"Keseluruhan customer journey akan kami tingkatkan dengan inovasi

Lebih lanjut Menko PMK menjelaskan beberapa alasan pengurangan libur, yakni kurva peningkatan Covid-19 belum melandai meski berbagai upaya sudah dilakukan. Sehabis libur panjang, ada kecenderungan kasus covid 19 mengalami peningkatan. Mobilitas masyarakat cenderung naik. Sementara itu program vaksinasi sedang berjalan.

"Oleh karena itu pemerintah perlu meninjau kembali cuti bersama yang

Surya Ananta menyampaikan, penerapan PPKM Mikro setidaknya memberikan angin segar bagi pusat perbelanjaan di DIY. Pemberlakuan PPKM Mikro berdampak positif, setidaknya mendorong kunjungan pusat perbelanjaan karena pembatasan jam operasional bertambah sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

"Tingkat kunjungan pusat perbelanjaan di DIY saat PPKM Mikro justru lebih tinggi dibandingkan kebijakan pembatasan sebelumnya, meskipun belum normal seperti sediakala. Hal itu dapat menggairahkan sektor ekonomi di pusat perbelanjaan," ujarnya.

yang menjadi perhatian karena areal lahan sawah yang cukup luas, yakni di Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, mencapai 45 hektare. Airnya dibuang ke aliran Sungai Pendo yang menuju Sungai Jeratun Seluna.

"Desa Kirig menjadi prioritas karena luasan areal sawahnya cukup besar, sehingga Pemerintah harus hadir untuk membantu petani, dengan menyedot genangan banjir agar segera surut," kata Plt Bupati Kudus Hartopo didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kudus Catur Sulistyanto.

Penyediaan mesin pompa menyedot air juga di Desa Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu, sebanyak dua

sos (internet) dan pasal 45 ayat (3) tentang kewenangan melakukan penahanan yang kadang kontradiktif dengan penerapan Pasal 21 KUHP.

Polisi berwenang menerima setiap pengaduan warga yang haknya terlanggar. Dan Polri selalu beranggapan setiap pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti atau diproses sesuai hukum. Namun polisi bukan keranjang sampah. Maka setiap pengaduan harus ada telaah komprehensif di lingkungannya, apakah pengaduan sudah diikuti bukti permulaan yang cukup ditindaklanjuti. Ubah persepsi : yang penting melapor dulu, mencari bukti adalah kewenangan polisi.

Apalagi pengaduan itu disampaikan warga masyarakat dengan didampingi seorang kuasa hukum (advokat). Maka kewajiban untuk membantu penyidik dalam mencari dan melengkapi bukti pengaduan adalah juga merupakan hak dari pengadu bersama kuasa hukumnya. Terlebih jika yang diadukan adalah merupakan delik aduan. Jika meru-

teknologi, interface sistem informasi, sehingga antrean [peserta] tidak lagi enam jam dan bisa lebih cepat," ujar Ali Ghufon Mukti .

Isu lainnya yang menjadi perhatian Ali adalah aspek kesepertaan. Dia berharap terdapat rasa kepemilikan dan keterlibatan dari semua pihak terhadap JKN, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi terkait, pemerhati jaminan sosial, hingga perguruan tinggi. (Sim/Ati)-f

berpotensi mendorong terjadinya arus pergerakan orang sehingga penularan meningkat," tuturnya.

Pemerintah juga tetap mengimbau agar masyarakat menjalankan 5M protokol kesehatan dan berusaha bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19.

"Sekali lagi ditegaskan bahwa Tahun 2021 Cuti Bersama dipotong 5 hari dari 7 hari yang ada," pungkas Menko PMK. (Ati)-f

Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemda DIY Biwara Yuswantana membenarkan Pemda DIY memperpanjang PPKM Mikro sesuai instruksi Pemerintah Pusat. Pihaknya berupaya meningkatkan pemantauan maupun pengawasan operasionalisasi pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kalurahan melalui Posko-posko Tanggap Covid-19 di setiap desa/kalurahan.

"Perpanjangan PPKM Mikro diharapkan memberikan dampak semakin baik dalam arti terjadi penurunan kasus positif maupun kasus meninggal, peningkatan kasus sembuh dan sebagainya," tuturnya. (Ria/Ira)-f

unit mesin, sedangkan luas areal persawahan yang tergenang di Desa Setrokalangan mencapai 20 hektare.

Penyedotan genangan banjir tersebut, diharapkan bisa membantu pemulihan perekonomian para petani di Kudus yang terdampak banjir.

Camat Mejobo Aan Fitriyanto menjelaskan, luas areal tanaman padi di Kecamatan Mejobo mencapai 902 hektare, sedangkan luas genangan di areal 470 hektare. Genangan banjir paling parah di Desa Kirig, disusul Payaman, Temulus dan Mejobo dengan luas areal lahan bervariasi. "Jika pompanisasi untuk menyedot air banjir di Desa Kirig hasilnya efektif, bisa dilanjutkan ke desa lainnya," ujarnya. (Ant)-f

kesan delik biasa maka itu menjadi kewenangan penyidik. Tapi masyarakat punya kewajiban untuk membantu penyidik kepolisian dalam menemukan bukti-bukti dalam suatu tindak pidana.

Secara universal, tugas polisi berimplementasi tiga hal. Pertama, merupakan institusi yang bertugas menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat agar tercapai suasana kehidupan yang aman tentram dan damai. Kedua, polisi merupakan institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat. Dan ketiga, polisi adalah merupakan instrumen yang dapat memaksakan berlakunya hukum demi pemulihan keadaan. Tapi instrumen yang ketiga ini kadang masih sering diputar balikkan yakni mengatakan bahwa polisi adalah hukum itu sendiri. Akibatnya, polisi sering kebablasan dalam menerapkan aturan hukum. Laiknya polisi dalam film India. (Penulis adalah advokat, Dosen FH UII)-f

## 'NGINGU BARENG' KAMBING UNDANG POLEMISK Sub Kontraktor-Mitra Konsultasi ke Polres

**PURWOREJO (KR)** - Belasan sub kontraktor pembangunan kandang dan mitra calon peternak domba program *Ngingu Bareng* yang digagas Koperasi UMKM Indonesia (KOIN) Kabupaten Purworejo, mendatangi Polres setempat, Senin (22/2). Mereka melakukan konsultasi hukum atas polemik seputar pelaksanaan pembangunan kandang dan rencana kelanjutan program budidaya kambing tersebut.

Delapan sub kontraktor dan delapan mitra peternak diterima KBO Satreskrim Polres Purworejo secara bergantian. "Mereka ingin persoalan yang dihadapi dapat diketahui semua pihak, termasuk kepolisian. Ini istilahnya *gendu-gendu rasa dulu*," kata pendamping dari LSM Tamperak, Sumakmun, menjawab pertanyaan KR.

Mitra dan sub kontraktor ini, masih menunggu serta belum akan mengambil langkah lebih lanjut, seperti gugatan pidana atau perdata. Mereka hanya ingin persoalan yang dihadapi cepat selesai. Hak-hak sub kontraktor dan mitra KOIN, kata Sumakmun, segera diselesaikan pihak PT MGJ atau KOIN.

Menurut Sumaknun, sub kontraktor dan mitra kerap mengeluhkan kesepakan yang dinilai tidak dilaksanakan pihak perusahaan dan koperasi. "Misalnya, ada ucapan kata janji untuk diselesaikan, tapi tidak terealisasi. Hal itu kerap terjadi," tuturnya.

Program yang ditawarkan KOIN Kabupaten Purworejo, jelasnya, bagus dan tidak bermasalah. Bahkan, program *Ngingu Bareng* dapat mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Purworejo apabila dijalankan dengan mekanisme yang baik.

"Soal proyek tidak masalah, menurut kami, akan sangat bermanfaat kalau dijalankan dengan mekanisme yang baik.

## Relawan

petugas Babinkamtibas, tetapi tidak digubris. Kebeutulan ketika diminta mengisi *ular-ular* pada acara hajatan di Kulonprogo kebiasaan Supriyadi diulangi lagi dan direkam warga serta diviralakan.

Akhirnya para relawan terutama FPRB memuncak kemarahannya dan Senin kemarin mendatangi DPRD Bantul untuk bertemu Supriyadi, namun yang bersangkutan tak berada di tempat. Perwakilan relawan kemudian diterima Wakil Ketua DPRD Bantul Subhan Nawwawi dan anggota dewan lainnya untuk mediasi.

Pada pertemuan itu, FPRB menyampaikan pernyataan sikap, pertama, FPRB Bantul sangat keberatan dan menyesalkan pernyataan Supriyadi soal penanganan jenazah Covid-19 yang dilakukan para relawan yang dengan tulus tanpa imbalan apapun, tetapi justru dilecehkan oleh anggota dewan ini.

Kedua, menuntut Supriyadi melakukan klarifikasi secara terbuka di media massa yang ada di DIY dan secara tertutup meminta maaf di depan pimpinan DPRD Bantul, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Dinas Kesehatan dan relawan di Bantul. Ketiga, FPRB meminta agar Supriyadi selaku tokoh masyarakat dan publik figur untuk ikut meng-

Hal yang penting, apa yang menjadi hak para mitra dan sub kontraktor dipenuhi," tegasnya.

Sub kontraktor asal Cilacap, Suteng Priyambudi mengatakan, kedatangannya ke Polres Purworejo bukan dalam rangka pelaporan atau aduan hukum. Mereka menyampaikan aspirasi soal keresahan karena sudah lama tidak menerima pembayaran atas proyek pembangunan kandang domba yang sudah dikerjakan sesuai perjanjian. Priyambudi dan belasan sub kontraktor lainnya berada di bawah bendera kontraktor utama Koperasi Serba Guna Rembang (KSGR). "Kami total ada 14 sub kontraktor, tapi datang delapan, sisanya mengatakan untuk diwakilkan," katanya.

Dalam perjanjian, kontraktor akan membayar sub kontraktor ketika selesai mengerjakan kandang dalam jumlah tertentu. "Saya dapat kontrak 50 kandang, bisa menang kalau selesai membangun sepuluh kandang," ujarnya.

Menurutnya, jumlah dana yang belum dibayarkan kepada 14 sub kontraktor itu mencapai kurang lebih Rp 11 miliar. "Sudah terwujud kandangnya, silakan cek lokasi, semua sudah sesuai gambar. Kalau kami menuntunya kepada KSGR, tapi koperasi baru bayar kami jika sudah dibayar pemberi tugas," terangnya.

Suteng Priyambudi berharap pihak kepolisian memanggil dan mengklarifikasi para pihak, sehingga dapat memberikan jawaban serta kepastian kapan sub kontraktor dibayar.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Agus Budi Yuwono mewakili Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito mengemukakan, pihak kepolisian menampung serta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan sub kontraktor dan mitra. "Akan kami tindaklanjuti," tandasnya. (Jas)-f

## Sambungan hal 1

tersebut Subhan berjanji segera menuntaskan masalah yang muncul dan melaporkan kepada Dewan Kehormatan DPRD. "Sesuai tuntutan FPRB kasus ini harus dituntaskan dalam waktu 1x24 jam. Supriyadi juga harus segera mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan," kata Subhan.

Pengunjukrasa kemarin datang ke DPRD Bantul pukul 10.00 sebagian besar membawa kendaraan bermotor. Sekitar pukul 11.45 mereka membubarkan diri dengan tetap menaati protokol kesehatan. (Jdm)-f



## Prakiraan Cuaca Selasa, 23 Februari 2021

Lokasi	Cuaca			Suhu C	Kelembaban
	Pagi	Siang	Malam		
Bantul	☁	☁	☁	23-31	65-95
Sleman	☁	☁	☁	23-30	70-95
Wates	☁	☁	☁	23-31	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	23-31	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	23-31	65-95

Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Petir



**Ferri Wicaksono SIP MA**  
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas AMIKOM Yogyakarta

"KALAU ada yang mudah, kenapa dipersulit?" "Kalau ada yang cepat, kenapa diperlambat?" Mari kita awali dengan membahas serapan 2 (dua) kata "kalau ada" yang selalu muncul dalam benak publik ketika mengakses suatu layanan. Perlu dipahami bahwa publik merupakan kumpulan makhluk rasional yang selalu ingin dipuaskan. Jika dimaknai kedua kata tersebut mengisyaratkan

## Calo: Sahabat Publik?

bahwa publik selalu mencari opsi terbaik, sayangnya bukan mengupayakan hal baik. Siapa yang salah? Tentunya publik tidak pernah bisa dan mau disalahkan. Publik selalu benar sudah menjadi hukum alam didalam pelayanan publik. Lantas siapa yang wajib memuaskannya? Negara sebagai sebuah jawaban ideal. Negara dengan seperangkat kekuasaannya, menjelma kedalam lembaga maupun biro yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, wajib menjalankan sebuah pelayanan publik. Pelayanan publik diselenggarakan dalam berbagai wujudnya sesuai dengan orientasi kepentingan publik. Setidaknya dibedakan kedalam 3 (tiga) jenis: Pertama, pelayanan administratif terkait kepemilikan dokumen-dokumen antara lain KTP, SIM, akte kelahiran, STNK, paspor, dan sejenisnya; Kedua, pelayanan barang, seperti

layanan air minum, listrik rumah tangga, hingga telepon rumah; Ketiga, pelayanan jasa, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Kesemua jenis pelayanan publik tersebut diakses oleh publik melalui seperangkat aturan hingga mekanisme yang diakomodir lembaga berwenang yang biasa kita kenal dengan istilah birokrasi. Birokrasi idealnya diwujudkan untuk melindungi publik. Melindungi dari ketidakberdayaan akses, melindungi dari ketidakberdayaan sumberdaya. Namun celakanya birokrasi inilah yang seringkali menjadi momok publik dalam mencari kepuasan layanan. "Birokrasi berbelit-belit" "Birokrasi rumit" "Birokrasi lamban", kalimat yang sering muncul sebagai wujud kekecewaan publik yang belum terpuaskan. Lantas siapa yang mampu memuaskannya? Calo. Meng-

gelitik namun seolah menjelma menjadi jawaban ideal. Entitas yang muncul diantara publik itu sendiri. Calo jika diibaratkan dalam sebuah film, dia sebagai tritagon. Meskipun munculnya calo sebagai salah satu penyakit birokrasi, namun calo menjadi pendamai antara negara dan publik. Yah, calo setidaknya mampu meredakan kekecewaan publik atas suatu layanan yang diselenggarakan oleh negara yang belum mampu memuaskannya publik. Calo bisa penulis sebut sebagai pengkritik kontemporer. Mereka tidak perlu berbicara keras dihadapan media, maupun berkeluh kesah dibalik layar atas ketidakpuasannya. Mereka mencari jalannya sendiri sekaligus mencari jalan untuk publik lainnya diantara celah-celah oknum yang, entah sengaja melemahkan birokrasi atau berdalih membantu publik.

Eksistensi para calo setidaknya mampu menguak tabir kebobrokan birokrasi pelayanan publik. Dimana birokrasi masih menciptakan diferensiasi publik. Publik tetap terbagi menjadi 2 (dua), yakni the have people dan the have-not people. Calo menjadi sahabat bagi the have people, bukan lagi mewujudkan pelayanan satu pintu ataupun satu atap, namun mampu mewujudkan pelayanan pintu ajaib. Semua beres dalam sekejap. Sementara para the have-not, tetap dalam zona aman namun tidak pernah nyaman. Mereka harus rela mengantre dan bertahan dengan persepsi ketidakpuasannya terhadap pelayanan publik.

Kewajiban bagi birokrasi, ketika masih dirasa mempersulit maka layak untuk mempermudah. Jika terdapat peraturan yang dirasa mempersulit publik, maka para oknum birokrasi wajib wacanakan perbaikan. Kewajiban bagi publik, tentunya harus memahami esensi publik bahwa kita sepakat untuk tidak saling mendahului maupun tidak saling menjatuhkan. Namun sama-sama mengupayakan suatu layanan yang equal. Harapannya ke depan tercipta pelayanan publik yang sehat mental dan humanis.\*\*\*

